

CASCADING DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MALINAU TAHUN ANGGARAN 2024

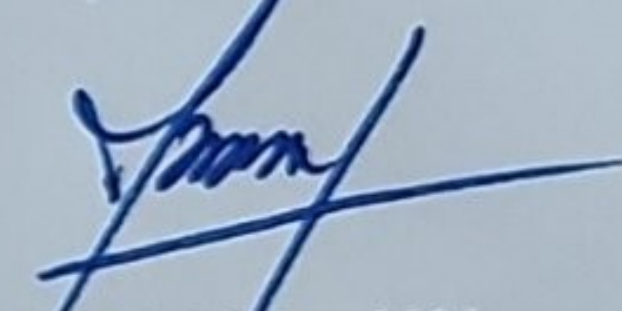
IKU KABUPATEN									IKU ESELON II				IKU ESELON III		IKU ESELON IV/ JAPUNG	
NO		MISI RPJMD	TUJUAN RPJMD	INDIKATOR TUJUAN RPJMD	TARGET INDIKATOR TUJUAN RPJMD 2024	SASARAN RPJMD	INDIKATOR KINERJA SASARAN RPJMD	TARGET INDIKATOR SASARAN RPJMD 2024	TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS PD	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS PD	SASARAN STRATEGIS BIDANG	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS BIDANG	SASARAN STRATEGIS SEKSI/ JAPUNG	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS SEKSI/ JAPUNG
1		2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14	15
1		Misi Ke-2 : Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang Berbasis Pada Potensi Daerah, Karakteristik dan Kearifan Lokal	Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Dan Karakteristik Daerah	Pertumbuhan PDRB	5,54	Meningkatnya Investasi daerah	Nilai Investasi Daerah	92.000.000.000	Menciptakan iklim Investasi yang kondusif	Persentase Minat Investor untuk Berinvestasi	Meningkatnya Nilai Investasi	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase peningkatan jumlah pelaku usaha	Tersedianya Perda dalam pemberian Fasilitas/ Insentif dan kemudahan penanaman modal	Jumlah Dokumen
															Tersedianya Dokumen PETA Potensi Investasi Kabupaten/ kota	Jumlah Dokumen
													Meningkatnya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Terpenuhiya Pengendalian kepatuhan perusahaan dalam menyampaika n LKPM	Terlaksananya Penyelesaian permasalahan dan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	Jumlah Kegiatan Usaha yang terselesaikan masalahnya
															Terlaksananya pembinaan terhadap pelaku usaha	jumlah Pelaku usaha yang mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi
															Terlaksananya pengawasan pada kegiatan usaha	jumlah Kegiatan dari pelaku usaha yang mendapatkan pengawasan dan evaluasi

2		Misi Ke-4 : Mewujudkan Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan	Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Baik (good governance)	Indeks RB	67,51	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	88	Meningkatkan Profesionalisme penyelenggaraan pelayanan perizinan	Persentase kepuasan pelayanan perizinan	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan Nonperizinan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersedianya Data Perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data Perizinan dan Penanaman modal	Terlaksananya penyediaan dan pengelolaan layanan konsultasi perizinan berusaha brbasis risiko	Jumlah pelaku usaha yang mendapat layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko
													Meningkatnya Pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang disampaikan	Persentase jumlah informasi perijinan dan Non perijinan yang disampaikan	Terlaksananya Pelayanan Perizinan berusaha terhadap pelaku usaha melalui system perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik	Jumlah Pelaku usaha yang mendapat pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko yang terintegrasi secara elektronik
															Terlaksananya Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha terhadap kegiatan pelaku usaha berbasis risiko	Jumlah kegiatan usaha yang mendapatkan pemantauan, analisis, evaluasi pelaporan berbasis risiko
															Tersedianya data pengelolaan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis system pelayanan perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik	Jumlah Data dan informasi Perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang dikelola, dikaji dan dimanfaatkan

														Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas aparatur terhadap Pelayanan Publik	Presentase Unit Kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur	Melaksanakan peningkatan kinerja Kepegawalan dan Penyusunan Program Dinas Pelayanan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah peningkatan pelayanan Aparatur dan Administrasi Perkantoran.
														Dokumen Perencanaan	Tertatanya Dokumen Perencanaan	Terdapatnya dokumen perencanaan	Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang direncanakan
															Persentase pelayanan keuangan bagi aparatur	Melaksanakan Pengelolaan Keuangan	Jumlah Pengelolaan Keuangan yang dikelola

Malinau, 03 Februari 2024

Kepala Dinas,



JUARI LAKAL S. Sos., M.M.

Pembina Tk I, IV/b

Nip. 19660622 200312 1 001